

Motif Politik Ekonomi dalam Rencana Pembangunan Kawasan Industri Sidayu

Reza Mahardika*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai motif politik ekonomi yang terjadi pada perencanaan pembangunan kawasan industri Gresik khususnya di Kecamatan Sidayu. Adanya perencanaan pembangunan tersebut, menegaskan bahwa ruang bukanlah objek pasif dan bersifat geografis. Hal ini dapat dilihat dari inkonsistensi tata ruang yang ada di Perda Gresik No. 8 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Kecamatan Sidayu adalah Kecamatan minapolitan. Sedangkan dalam Rancangan Tata Ruang Kecamatan 2016, Kecamatan tersebut akan menjadi Kawasan Industri Sidayu (KIS). Terjadinya inkonsistensi disebabkan karena adanya motif politik ekonomi dalam kebijakan Pemerintah Tersebut. Pemkab Gresik memiliki motif ekonomi politik dalam perencanaan pembangunan adalah untuk menyerap surplus kapital dan surplus tenaga kerja. Hal ini tidak terhindar dari peran Pemkab Gresik sebagai pengendali, perencanaan, pemanfaatan suatu ruang. Pemkab Gresik sebagai pemanfaat ruang membutuhkan satu sumber ekonomi yang baru, dimana dapat menarik investasi masuk sekaligus untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru.

Kata Kunci : Politik Tata Ruang, *Spatio Temporal Fixes*, Surplus Kapital, Surplus Tenaga Kerja, Motif Politik Ekonomi

ABSTRACT

This study discusses the political economic motives that occurred in the planning of industrial development Gresik especially in Sidayu District. The existence of such development plan. This can be seen from the existing spatial inconsistency in Perda Gresik. 8 year 2011 which states Sidayu District is Minapolitan District. While in the 2016 Sub-district Spatial Planning, the Sub-district will become Sidayu Industrial Estate (KIS). The occurrence of inconsistencies that occur because of political economic motives in Government policy. Gresik Regency has a political economic motive in development planning is to absorb surplus capital and labor surplus. This is not avoided from the role of Pemkab Gresik as a controller, Planning, utilization of a space. Pemkab Gresik as a beneficiary of space that one new economic resources, which can attract investment in at once to create a new job.

Keyword : Spatial Politic, *Spatio Temporal Fixes*, Surplus Capital, Surplus Labor, Political Economy Motives

*Peneliti adalah mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Rezamahardika016@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kebutuhan ruang akan bermukim di Indonesia sendiri, pertumbuhan penduduk di kota besar menjadi faktor yang penting. Dimana seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka ruang akan sesak. Menurut Sujarto, strategi pembangunan kota baru merupakan solusi dari permasalahan tata ruang yang ada. Dikatakan solusi yang paling tepat karena sifat dari pembangunan kota baru yang mandiri dan dapat memaksimalkan aktivitas berpendudukan bagi para penghuninya.¹

Kabupaten Gresik yang menurut geografis dekat dengan Surabaya menjadikan Gresik tumbuh menjadi daerah penyangga. Dengan letak yang strategis Kabupaten Gresik kemudian mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini menurun 0,88% jika dilihat dari waktu yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Dilihat dari letak strategis Gresik terhadap Jawa Timur, peningkatan perekonomian Gresik di atas Jawa Timur yaitu sebesar 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42% dibandingkan waktu yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%.²

Penelitian ini menggunakan teori Harvey mengenai kerangka kerja logika kekuasaan dan kapitalis. Kapitalis akan berusaha untuk mendominasi kapital tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Hal ini dikarenakan kapitalis menginginkan profit yang tinggi. Akhirnya politisi akan berusaha untuk menjalin hubungan dengan kapitalis untuk melebarkan kekuasaan yang dimilikinya. Kapitalis hanya mengincar suatu profit dan hanya menjalin hubungan dengan para penguasa. Penguasa mencari suatu keuntungan pribadi dari hubungan yang terjalin dan hanya dalam usahanya mereka hanya dibatasi oleh ruang serta konstitusi Negara dan bertanggung jawab kepada warga negara.³

Ruang kota kemudian menjadi obyek dari penataan ruang. Ruang kemudian dipahami sebagai obyek politik yang tidak bebas dari kepentingan setiap aktornya. Aktor politik tata ruang terdiri dari kelompok kapitalis, pemerintah dan masyarakat. Relasi kuasa antar aktor dapat menentukan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Jika kita mengatakan RTRW maka ada kaitan erat dengan ruang itu sendiri, bagaimana ruang di konstruksi dan diperebutkan berdasarkan kepentingan yang diinginkan aktor. Proses mengkonstruksi ruang ini erat kaitannya dengan relasi kuasa antar aktor yang berada dalam tarikan pendulum dan kontinuitas konflik kontestasi.⁴

Menurut RTRW dalam Perda No 8 tahun 2011 kecamatan Sidayu diperuntukkan untuk menjadi kawasan minapolitan. Hal ini berbenturan dengan rencana pembangunan KIS di kecamatan sidayu oleh pemerintah. Dengan adanya perbedaan ini maka DPRD komisi C tidak menyetujui adanya pembangunan kawasan industri di Sidayu dan Gresik meminta eksekutif tidak melanjutkan proses perizinannya. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan ruang di kecamatan Sidayu masih sesuai dengan RTRW yakni sebagai kawasan minapolitan. Akan tetapi berdasarkan data di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik, KIG Sidayu saat ini sudah mengantongi Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).

Kawasan Industri Gresik Sidayu berada di kawasan Desa Golokan, Purwodadi hingga wilayah Desa Tanjengawan. Ada sekitar 200 hektare yang disiapkan untuk menyulap lahan

¹Sujarto, D. "Perencanaan Kota Baru. "Bandung: Penerbit ITB, 1995.

² Katalog BPS : 1102001.3525, GRESIK DALAM ANGKA 2015

³ David Harvey. "Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination." Annals of the Association of American Geographers 80.3 (1990)

⁴Siti Aminah. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya". Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI. 2015.

tambak menjadi kawasan industri terpadu. Kawasan itu merupakan pengembangan dari KIG di Kecamatan Gresik dan Manyar. Meski, merujuk Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan KIG Sidayu itu merupakan kawasan minapolitan.

Studi sebelumnya, juga banyak membahas kasus serupa. Misalnya dalam studi yang dilakukan oleh Aminah menegaskan bahwa praktik tata ruang, khususnya di Surabaya, berorientasi pada pengembangan kawasan ke wilayah timur.⁵ Hal ini dikarenakan kekuatan investor atau pengembang telah berhasil mengambil alih kepemilikan dari masyarakat dan berkuasa atas ruang tersebut.⁶ Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah, bagi kapitalis ruang adalah obyek yang harus diproduksi dan direproduksi untuk melancarkan sirkuit kapital.

Penelitian lain menjelaskan bahwa tuntutan perkembangan yang terjadi saat ini dibarengi dengan keterbatasan ruang. Jakarta kemudian mengembangkan peningkatan intensitas pemanfaatan lahan pada beberapa wilayah strategis. Konsekuensi dari kebutuhan ini maka Jakarta mulai mengembangkan beberapa kawasan fungsional dengan pola superblock.⁷ Inti dari penelitian tersebut, kebutuhan akan daya dukung kota untuk kemajuan ekonomi, memaksa pada dua pilihan yakni pengembangan wilayah ditandai dengan spatio temporal fixes, atau dengan intensitas pemanfaatan lahan.

Penelitian ini kemudian menjelaskan mengenai motif politik ekonomi dalam perencanaan pembangunan Kawasan Industri Sidayu (KIS) di Kecamatan Sidayu. Karena bagaimanapun, perencanaan pembangunan Industri pada salah satu kawasan Gresik Utara ini menunjukkan bahwa praktik penataan ruang di perkotaan berdampak pada peningkatan perekonomian Kabupaten Gresik. Dalam praktik penataan ruang kita tidak dapat menghilangkan unsur politik yang ada di dalamnya. Bagaimana para aktor melakukan negosiasi guna penataan ruang sesuai kepentingannya.

***Spatio Temporal Fixes* dalam Perencanaan Kawasan Industri Gresik di Sidayu**

Secara defisinional, *Spatio Temporal Fixes* merupakan metafora bagi pemecahan krisis-krisis kapitalisme yang terjadi lewat penanganan sementara dan ekspansi suatu wilayah. Produksi ruang menciptakan sistem yang baru secara teritorial dalam hal organisasi dan pembagian tenaga kerja. Adanya produksi ruang memunculkan ruang dengan sumber daya baru dan lebih murah, serta ruang secara keseluruhan yang bergerak aktif. Hal ini menjadi cara penting untuk menciptakan penyerapan surplus kapital dan surplus tenaga kerja.⁸

Ekspansi dan rekonstruksi geografis semacam ini dapat mengguncang nilai-nilai yang telah diputuskan, sehingga nantinya dapat menciptakan konflik yang tak terhindarkan. Menurut Harvey, konflik muncul ketika ruang-ruang bergerak secara aktif yang terkumpul kemudian menghasilkan surplus dan berusaha menemukan cara penyerapan melalui ekspansi

⁵ Siti Aminah. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya". Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI. 2015.

⁶ Ibid

⁷ Primaristanti, dan Alinda FM Zein. "Analisis Spasial dan Temporal dalam Perubahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung" Jurnal Lanskap Indonesia.

⁸ Setyaka Virtuous, 2013, Ruang dan Waktu dalam Pemikiran David Harvey. Diakses di <http://indoprogress.com/2013/05/ruang-dan-waktu-dalam-pemikiran-david-harvey/> pada tanggal 17 Januari 2018

geografis.⁹ Meski *spatio temporal fixes* bisa dilihat dalam kerangka kewilayahan, namun relasi-relasi material dan sosial wilayah yang terbangun melalui proses molekuler.

Pengembangan kawasan Industri ke wilayah Gresik Utara merupakan bagian dari gerak kapital. Dalam artian, perbandingan antara kepadatan pusat kota dengan tiga kecamatan di kawasan Gresik Utara, maka selisih dari kepadatan itu begitu tinggi.¹⁰ Lantas hal ini dimaknai bahwa Pemkab Gresik melalui RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2011 telah disetujui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana dalam RDTRK yang dibahas oleh Pemkab dan DPRD Gresik tersebut, kawasan Gresik Utara menjadi salah satu kawasan industri besar dan kecil, membuktikan bahwa Pemkab Gresik sedang menjalankan fungsinya sebagai aktor politik tata ruang dalam konteks pemanfaatan dan pengendalian.

Langkah Pemkab Gresik untuk melakukan pola pemanfaatan pada daerah yang memiliki tingkat kepadatan rendah, merupakan bagian dari motif pemerintah untuk memajukan daerahnya dan menghindari kritis. Logika pembukaan kompleks sumber daya baru seperti Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu adalah pembukaan kompleks sumber daya baru dan lebih murah. Praktis, hal ini tidak lepas dari harga tanah di pusat kota yang begitu menjulang, sedangkan di saat bersamaan ada daerah pinggiran yang menawarkan nilai jual murah. Lantas pembangunan infrastruktur menjadi solusi atas jarak sekalipun.

Jika Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu dimaknai sebagai pembukaan ruang dengan sumber daya baru dan lebih murah, maka dapat dikatakan pembukaan ruang yang baru dan terhitung bergerak secara aktif serta adanya hubungan relasi sosial yang telah ada oleh relasi-relasi sosial merupakan cara yang signifikan untuk menyerap surplus kapital dan surplus tenaga kerja. Sebagai kota Industri, magnet ekonomi Kabupaten Gresik begitu tinggi. Lantas jumlah pendatang baru pada tiap tahun terus naik. Meski saat bersamaan, jumlah pengangguran juga terus meningkat. Hal seperti ini, yang kemudian menjadi stimulan agar Pemkab Gresik menciptakan kompleks sumber daya baru untuk menyerap surplus tersebut.

Sedangkan indikator terhadap surplus kapital dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah kota mengalami tren signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, pada derajat tertentu itu justru mengkhawatirkan. Volatilitas ekonomi terjadi ketika putaran kapital hanya di pusat kota. Sedangkan kepentingan kelompok kapitalis tidaklah sekedar berkompetisi pada pangsa pasar yang terbatas saja. Melainkan kelompok kapitalis juga memiliki kepentingan yang tidak ingin terhambat dalam mengoperasionalkan sirkuitnya.

Dalam pandangan Harvey sirkuit kapital terdiri dari sirkuit primer, sekunder dan tersier. Pertama, sirkuit primer terdiri dari ranah produksi dan konsumsi langsung. Kedua, sirkuit sekunder, terdiri dari ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap. Ketiga, sirkuit tersier yaitu ranah bagi pendidikan dan riset serta pengembangan. Praktis, sirkuit primer berlangsung biasanya di pusat kota. Sedangkan sirkuit sekunder, menjadi kapital tetap untuk produksi. Pada sirkuit ini, Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu dikategorisasikan. Beberapa hal yang identik dengan sirkuit kapital sekunder adalah pabrik dan perlengkapan, kapasitas penghasil listrik, jaringan rel kereta api, pelabuhan dan sebagainya. Berikut juga penciptaan atas suatu dana konsumsi seperti hunian atau perumahan. Dalam derajat tertentu,

⁹ Ibid

¹⁰ Wawancara Rusidi Hudi Prasetyo Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Wilayah infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gresik.

dalam sirkuit sekunder ini, terdapat aset-aset investasi yang menempati suatu tempat yang dibangun untuk diproduksi dan dikonsumsi, seperti jaringan transportasi, bandara, pelabuhan, kawasan industri, rumah sakit, dan sekolah. Investasi ini menurut Harvey akan menyerap sejumlah besar kapital dan tenaga kerja, terutama ketika terjadi penciptaan ruang yang baru.¹¹

Sebagaimana mengenai asumsi penciptaan suatu ekonomi ruang, menurut Harvey, Pertukaran barang dan jasa, termasuk tenaga kerja, mungkin dapat mengakibatkan suatu perubahan dalam lokasi yang menimbulkan gerak tata ruang saling bertabrakan dan menciptakan suatu wilayah interaksi yang khas. Industri seperti pabrik yang tersentralisasikan merupakan bagian dari itu semua. Jika tidak terjadi penciptaan suatu ekonomi ruang, maka selain terbatasnya ruang kota yang menimbulkan banyak problematika, sebenarnya juga akan menjadikan kompetisi dalam sistem kapitalis yang begitu ketat, kelompok kapitalis kemudian cenderung mengejar keuntungan kompetitif dengan memanfaatkan struktur spasial dan cenderung terdorong dan bergerak ke lokasi dimana biayanya rendah atau labanya tinggi. Hal ini juga tidak lepas dari pola pengembangan kawasan Industri di Kecamatan Sidayu.¹²

Kabupaten Gresik yang memiliki letak strategis yaitu bersebelahan dengan Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur, menjadikannya sebagai daerah penyangga. Dilihat dari posisi letak Gresik di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik berada di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%.¹³

Praktis, kondisi sebagai kota penyangga atau *buffer city* memiliki keuntungan strategis. Sub urbanisasi, atau gerak kapital di Ibukota Provinsi, sedikit banyak juga mempengaruhi arus kapital di Kabupaten Gresik. Jika logika yang dipakai oleh Kelompok kapitalis adalah membuka ruang baru, dengan biaya rendah dan keuntungan tinggi, maka tidak bisa dilepaskan dari persoalan gaji dan nilai beli lahan sebagai bagian dari modal yang harus dikeluarkan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2017 sudah ditandatangani Gubernur Jatim. UMK tertinggi adalah Surabaya sebesar Rp 3.296.212,50. Sedangkan Kab Gresik Rp. 3.293.506,25.¹⁴ Perbedaan tipis ini memang cenderung tidak mendorong kelompok kapitalis kota Surabaya untuk melakukan gerak ekspansi kapital ke kawasan Industri Gresik di Sidayu. Meski pada saat bersamaan, potensi pelabuhan yang akan dibangun menjadi nilai tertentu dalam perhitungan kelompok kapitalis.

Motif Ekonomi Politik sebagai Faktor Perubahan Minapolis menjadi Kawasan Industri

Perencanaan Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu adalah bagian dari perubahan fungsi ruang. Dari minapolitan menjadi kawasan industri, seperti pergudangan, pabrik dan infrastruktur penunjang pelabuhan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari motif politik ekonomi. Pada umumnya, sikap pemerintah yang tidak netral atau berpihak kepada kapitalis merupakan suatu kebutuhan dari pemerintah untuk merangkul kapitalis, selain kapitalis juga membutuhkan pemerintah termasuk dukungan dan kemauan politiknya untuk

¹¹ Setyaka Virtuous, 2013, Ruang dan Waktu dalam Pemikiran David Harvey. Diakses di <http://indoprogress.com/2013/05/ruang-dan-waktu-dalam-pemikiran-david-harvey/> pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 11.00

¹² Ibid

¹³ Katalog BPS : 1102001.3525, GRESIK DALAM ANGKA 2015

¹⁴ Wawancara Farida Haznah, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perizinan Badan Penanaman modal Dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Gresik.

mengoperasikan sirkuit kedua kapitalnya maupun sirkuit pertamanya yaitu berupa pembangunan industri (manufaktur) dan perdagangan.

Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa motif politik ekonomi dalam perencanaan kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu terdiri dari beberapa hal. Pertama, motif politik ekonomi dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah untuk menyerap surplus capital dan surplus tenaga kerja. Surplus kapital di Gresik dipicu karena lokasi strategis Kabupaten tersebut dengan Ibukota Propinsi yakni Surabaya. Pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi indikator, bahwa Kabupaten Gresik tumbuh menjadi kota penyangga, dengan geliat investasi dan industri yang signifikan.¹⁵ Pertumbuhan ekonomi ini menjadi tren positif, meski pada derajat tertentu membutuhkan sumber daya baru untuk mengoperasionalkan sirkuit kapital.

Kepentingan kelompok kapitalis adalah mengoperasionalkan sirkuit kapital tanpa hambatan. Sebagaimana Pemkab Gresik memiliki kepentingan untuk menjaga tren positif tersebut, berikut motif politik untuk kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan pemerataan. Untuk hal ini, dengan instrumen kebijakannya, Pemkab Gresik memainkan perannya sebagai actor penataan ruang. Otoritas tersebut terdiri dari pengendalian, pemanfaatan dan perencanaan.

Pengembangan kawasan Industri ke wilayah Gresik Utara merupakan bagian dari gerak kapital. Dalam artian, perbandingan antara kepadatan pusat kota dengan tiga kecamatan di kawasan Gresik Utara, maka selisih dari kepadatan itu begitu tinggi. Lantas hal ini dimaknai bahwa Pemkab Gresik melalui RTRW Kabupaten Gresik yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2011 telah disetujui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana dalam RDTRK yang dibahas oleh Pemkab dan DPRD Gresik tersebut, kawasan Gresik Utara menjadi salah satu kawasan industri besar dan kecil, membuktikan bahwa Pemkab Gresik sedang menjalankan fungsinya sebagai aktor politik tata ruang dalam konteks pemanfaatan dan pengendalian.

Pemkab Gresik sebagai mana dalam Dokumen RDTRK Gresik Utara 2010–2030 tersebut telah disepakati pada akhir tahun 2016. RDTRK ini mengacu pada RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2011 bahwa kawasan Gresik Utara merupakan kawasan industri besar dan kecil. Dalam RDTRK Gresik Utara 2010–2030, ada tiga wilayah yang masuk dalam perencanaan itu, salah satunya adalah kecamatan Sidayu. Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa Pemkab Gresik menjalankan juga fungsinya untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Pengendalian ruang dalam konteks ini adalah mengurai kepadatan kota. Kecamatan Sidayu sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah nomor tiga.¹⁶ Inilah kemudian yang menjadi argumentasi mengenai pemanfaatan ruang. Sedangkan pengendalian ruang Gresik, ditinjau dari kepadatan pusat kota karena tumbuhnya industri besar kecil yang menjamur di tengah kota, khususnya di kecamatan Gresik. Selisih kepadatan di kecamatan tersebut dengan Kecamatan Sidayu begitu kontras. Motif politik ekonomi kemudian adalah menyerap surplus tenaga kerja. Terjadi surplus tenaga kerja karena Gresik tumbuh menjadi magnet ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan UMK Kabupaten Gresik tertinggi kedua setelah

¹⁵ Ibid

¹⁶ Wawancara Rusidi Hudi Prasetyo Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Wilayah infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gresik.

kota Surabaya. Hal ini kemudian mendorong penduduk pendatang, dan serbuan tenaga kerja. Untuk hal ini, Pemkab Gresik berkepentingan untuk mengurangi pengangguran dan agar tidak terjadinya krisis.

Krisis dalam konteks ini tidak hanya sekedar kemacetan. Lebih jauh krisis dalam hal ini ketika Kelompok kapitalis tidak lagi mampu mengoperasionalkan sirkuit kapitanya. Hal ini dikarenakan sumber daya terbatas, pangsa pasar terbatas, lantas kompetisi yang sifatnya global begitu mencuat. Lantas persaingan berdarah-darah ini tentu mendorong terjadinya volatilitas ekonomi. Besaran kepentingan politik ekonomi terhadap perencanaan di kecamatan Sidayu ini mendorong konflik, kontestasi dan negosiasi. Hal ini dibuktikan dengan inkonsistensi antara RTRW dan RTDR. Dalam RTRW ditekankan bahwa Kecamatan Sidayu merupakan kawasan industri minapolitan. Sedangkan secara RTDR, Kecamatan Sidayu akan menjadi kawasan industri Gresik baik industri itu besar atau kecil. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan arteri yang akan dibangun melewati kecamatan tersebut¹⁷.

Kesimpulan

Motif politik ekonomi dalam perencanaan kawasan industri Gresik di Kecamatan Sidayu terdiri dari beberapa hal. Pertama, motif politik ekonomi dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah untuk menyerap surplus capital dan surplus tenaga kerja. Surplus kapital di Gresik dipicu karena lokasi strategis Kabupaten tersebut dengan Ibukota Provinsi yakni Surabaya. Pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi indikator, bahwa kota Gresik tumbuh menjadi kota penyangga, dengan geliat investasi dan industri yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi tren positif, meski pada derajat tertentu membutuhkan sumber daya baru untuk mengoperasionalkan sirkuit kapital. Motif politik ekonomi bertujuan menyerap surplus tenaga kerja. Terjadi surplus tenaga kerja karena Gresik tumbuh menjadi magnet ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan UMK Kabupaten Gresik tertinggi kedua setelah kota Surabaya. Hal ini kemudian mendorong penduduk pendatang, dan serbuan tenaga kerja. Untuk hal ini, Pemkab Gresik berkepentingan untuk mengurangi pengangguran dan agar tidak terjadinya krisis. Krisis dalam konteks ini tidak hanya sekedar kemacetan. Lebih jauh krisis dalam hal ini ketika Kelompok kapitalis tidak lagi mampu mengoperasionalkan sirkuit kapitanya. Hal ini dikarenakan sumber daya terbatas, pangsa pasar terbatas, lantas kompetisi yang sifatnya global begitu mencuat. Lantas persaingan berdarah-darah ini tentu mendorong terjadinya volatilitas ekonomi.

Pemkab Gresik dalam rencana pembangunan kawasan industri Gresik di Kecamatan Sidayu telah melakukan inkonsistensi dalam RTRW tahun 2010. Dimana dalam RTRW dijelaskan daerah Sidayu akan menjadi kawasan minapolitan, realitanya daerah tersebut akan dijadikan kawasan industri. Dalam inkonsistensi yang dilakukan Pemkab Gresik, tidak terhindar dari peran Pemkab Gresik sebagai pemanfaat ruang. Pemanfaatan ruang yang dilakukan adalah merubah Kecamatan Sidayu menjadi kawasan industri meskipun bertentangan dengan RTRW. Hal ini dilakukan karena tidak adanya ruang yang memadai di pusat kota dalam artian pusat kota sudah penuh dan sesak, sehingga pemerintah memerlukan lahan baru yang memadai untuk pembangunan kawasan industri. Pemkab Gresik dalam Inkonsistensinya dikarenakan peran yang ditanggungnya sebagai pemanfaat, pengendali, dan perencana ruang.

¹⁷ Ibid

DAFTAR PUSTAKA

- David Harvey. "Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination." *Annals of the Association of American Geographers* 80.3 (1990): 418-434.
- David Harvey. 1985. *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. Oxford UK: Blackwell.
- Sujarto, D. "Perencanaan Kota Baru." *Bandung: Penerbit ITB*, 1995.
- Siti Aminah. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya". *Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI*. 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO. 8 tahun 2011
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik. Diakses di <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-gresik-2013.pdf>
- Setyaka Virtuous, 2013, Ruang dan Waktu dalam Pemikiran David Harvey. Diakses di <http://indoprogress.com/2013/05/ruang-dan-waktu-dalam-pemikiran-david-harvey/> pada tanggal 17 Januari 2018
- Pemkab Gresik. (2015). *Pertumbuhan Ekonomi*. http://gresikkab.go.id/profil/pertumbuhan_ekonomi. Diakses pada 25 Desember 2017.
- Suryo Eko Prasetyo. (2017). *Pengembangan Gresik Utara Menjadi Pusat Ekonomi Baru*. <https://www.jawapos.com/read/2017/01/04/100002/pengembangan-gresik-utara-menjadi-pusat-ekonomi-baru-potensi-kuat-investor-terpikat>. Diakses pada 16 Januari 2018
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2014). *Kawasan Minapolitan*. perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143574-Konten. Diakses pada 27 Desember 2017